



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU
MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan proses seleksi terhadap media massa yang akan bekerjasama, maka sebagian ketentuan dan lampiran Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kota Banjarbaru melalui Media Massa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 337);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kota Banjarbaru Melalui Media Massa (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perusahaan Media Massa yang disetujui melakukan Kerja Sama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan sesuai kriteria Kerja Sama Media Massa yang ditetapkan oleh PD.
- (2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan Kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan PKS.
- (3) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan PD dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat PD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dapat menunjuk biro iklan untuk mengelola keseluruhan kerjasama publikasi. Adapun Ketentuan mengenai penunjukan dan proses lainnya dapat dituangkan dalam surat keputusan kepala PD atau pengguna anggaran.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Ruang lingkup PKS dengan DPRD dan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. aspek penyebarluasan informasi Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
 - b. Program Prioritas Daerah; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan/agenda kerja pimpinan DPRD beserta anggota DPRD dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
 - (2) Ruang lingkup PKS dengan PD berupa diseminasi program dan kegiatan PD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing- masing PD.
 - (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran;
 - (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Juli 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 31 Tahun 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

PERSYARATAN KUALIFIKASI
MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media cetak harus terverifikasi faktual sejak Peraturan Walikota ini di tetapkan.
3. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
 - i. Profil Perusahaan Pers.
 - j. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan.
4. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
5. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;
6. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan).

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media siber harus terverifikasi faktual selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini di tetapkan.
3. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
 - d. Email perusahaan;
 - e. Alamat website;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

- h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - j. Profil Perusahaan Pers.
 - k. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan.
4. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
 5. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan media siber.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Perusahaan pers media elektronik harus terverifikasi faktual sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
3. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaanmedia;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhirperusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - h. Profil Perusahaan Pers;
 - i. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan;
 - j. Surat Keterangan sudah melakukan migrasi siaran Digital (khusus Televisi);
4. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).

IV. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

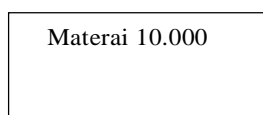
PERUSAHAAN :

| NO. | URAIAN KRITERIA | FAKTOR VERIFIKASI | CEKLIS PADA KOLOM |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Terverifikasi Di Dewan Pers | Terverifikasi Faktual | |
| | | Terverifikasi Administrasi | |
| | | Tidak Terverifikasi | |
| 2. | Halaman Khusus Banjarbaru | 1 Halaman | |
| | | ½ Halaman | |
| | | ¼ Halaman | |
| | | Tidak Ada | |
| 3. | Sebaran Oplah | Nasional/Regional | |
| | | Provinsi | |
| | | Kota | |
| 4. | Sebaran Oplah Di Kota Banjarbaru | 1-5 Kecamatan | |
| | | 1-3 Kecamatan | |
| | | 1 Kecamatan | |
| 5. | Jumlah Penerbitan Oplah Harian | > 15.000 | |
| | | 5.000 s/d 15.000 | |
| | | < 5.000 | |

| | | | |
|-----|---|---------------------------|--|
| 6. | Status Wartawan | Ada Khusus Banjarbaru | |
| | | Ada Merangkap Daerah Lain | |
| | | Tidak Ada | |
| 7. | Wartawan yang Bertugas di Banjarbaru Memiliki Kompetensi (UKW) Minimal Tingkat Muda | Sudah | |
| | | Belum | |
| 8. | Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Memiliki Kompetensi (UKW) Wartawan Utama | Ada | |
| | | Tidak Ada | |
| 9. | Cakupan Media | Nasional/Regional | |
| | | Provinsi | |
| | | Kota | |
| 10. | Kantor/Biro di Kota Banjarbaru | Ada | |
| | | Tidak Ada | |
| 11. | Frekuensi Penerbitan | 1 Kali Sehari | |
| | | 4 Kali Sebulan | |
| | | 2 Kali Sebulan | |

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,
.....20.....
PT. (nama perusahaan)



.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria no. 1 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
3. Kriteria no. 2 (halaman khusus Banjarbaru) agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria no. 3, 4 dan 5 (sebaran oplah), kriteria no. 9 (cakupan media) serta kriteria no. 11 (frekuensi penerbitan) melampirkan Surat Pernyataan (*sesuai format*) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
5. Kriteria no. 6 (status wartawan) melampirkan surat tugas dari Pimpinan Perusahaan;
6. Kriteria no. 7 dan 8 (kompetensi wartawan/pimred) melampirkan Salinan kartu/sertifikat UKW;
7. Kriteria no. 10 (Kantor/Biro), melampirkan foto kantor/biro.

V. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

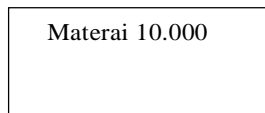
PERUSAHAAN :

| NO. | URAIAN KRITERIA | FAKTOR VERIFIKASI | CEKLIS PADA KOLOM |
|-----|---|----------------------------|-------------------|
| 1. | Terverifikasi Di Dewan Pers | Terverifikasi Faktual | |
| | | Terverifikasi Administrasi | |
| | | Tidak Terverifikasi | |
| 2. | Analisa Digital Web/ Google Analytics | Ada | |
| | | Tidak Ada | |
| 3. | Jumlah Viewer di Analisa Digital Web/ Google Analytics minimal 1 bulan terakhir | > 5.000.000 | |
| | | 1.000.000 s/d 5.000.000 | |
| | | 500.000 s/d 999.000 | |
| | | < 500.000 | |
| 4. | Usia Web | 1-2 Tahun | |
| | | 2,1-4 Tahun | |
| | | 4,1-6 Tahun | |
| | | 6,1-8 Tahun | |
| | | > 8 Tahun | |
| 5. | Halaman Web | Halaman Khusus Banjarbaru | |
| | | Tanpa Halaman Banjarbaru | |
| 6. | Masa Expired/ Kadaluwarsa Web | 1 Tahun | |
| | | 2 Tahun | |
| | | 3 Tahun atau Lebih | |
| 7. | Status Wartawan | Ada Khusus Banjarbaru | |
| | | Ada Merangkap Daerah Lain | |
| | | Tidak Ada | |
| 8. | Wartawan yang Bertugas di Banjarbaru Memiliki Kompetensi (UKW) Minimal Tingkat Muda | Sudah | |
| | | Belum | |
| 9. | Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Memiliki Kompetensi (UKW) Wartawan Utama | Ada | |
| | | Tidak Ada | |
| 10. | Update Berita Umum Saat Pengajuan | Ada | |
| | | Tidak Ada | |
| 11. | Update Berita Banjarbaru Saat Pengajuan | Ada | |
| | | Tidak Ada | |
| 12. | Followers Media Sosial (IG/FB/Youtube/Tiktok) | > 100.000 | |
| | | 50.001 s/d 100.000 | |
| | | 10.001 s/d 50.000 | |
| | | 6.001 s/d 10.000 | |
| | | 3.001 s/d 6.000 | |
| | | < 1.000 | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 13. | Layanan Informasi Tambahan Luar Ruang | Display Informasi di Ruang Publik (Videotron/Digital Display) | |
| | | Program Podcast Rutin | |
| | | Tidak Ada | |

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,
.....20....
PT. (*nama perusahaan*)



.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria no. 1 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
3. Kriteria no. 2 dan 3 (analisa digital web/google analytic) melampirkan Laporan hasil analisis;
4. Kriteria no. 4, 5, 10, 11 dan 12 melampirkan print screen/screenshoot web;
5. Kriteria no. 6 (expired/kadaluwarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
6. Kriteria no. 6 (status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kota Banjarbaru;
7. Kriteria no. 8 dan 9 (kompetensi wartawan/pimred) melampirkan salinan sertifikat UKW;
8. Kriteria No. 13 (Layanan Informasi Tambahan) antara lain Videotron dan Podcast melampirkan bukti yang mendukung.

VI. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

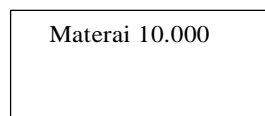
PERUSAHAAN :

| NO. | URAIAN KRITERIA | FAKTOR VERIFIKASI | CEKLIS PADA KOLOM |
|-----|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Terverifikasi Di Dewan Pers | Terverifikasi Faktual | |
| | | Terverifikasi Administrasi | |
| | | Tidak Terverifikasi | |
| 2. | Cakupan Siaran | 1-5 Kecamatan | |
| | | 1-3 Kecamatan | |
| | | 1 Kecamatan | |

| | | | |
|----|---|---------------------------|--|
| 3. | Status Wartawan | Ada Khusus Banjarbaru | |
| | | Ada Merangkap Daerah Lain | |
| | | Tidak Ada | |
| 4. | Wartawan yang Bertugas di Banjarbaru Memiliki Kompetensi (UKW) Minimal Tingkat Muda | Sudah | |
| | | Belum | |
| 5. | Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Memiliki Kompetensi (UKW) Wartawan Utama | Ada | |
| | | Tidak Ada | |
| 6. | Siaran Khusus Media Elektronik | Digital | |
| | | Analog | |
| 7. | Jam Tayang Siaran | > 10 Jam | |
| | | < 10 Jam | |
| | | < 5 Jam | |

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,
.....20....
PT. (nama perusahaan)



.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenarbenarnya;
2. Kriteria no. 1 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
3. Kriteria no. 2 (jangkauan siaran) serta kriteria no. 6 dan 7 melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung jika ada;
4. Kriteria no. 3 (status wartawan) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
5. Kriteria no. 4 dan 5 (UKW) melampirkan salinan sertifikat UKW.

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTIARIFFIN

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 31 Tahun 2024
 TAHUN : 31 Juli 2024

STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
 PERUSAHAAN :

| NO. | URAIAN KRITERIA | FAKTOR VERIFIKASI | POIN |
|-----|---|----------------------------|------|
| 1. | Terverifikasi Di Dewan Pers | Terverifikasi Faktual | 12 |
| | | Terverifikasi Administrasi | 6 |
| | | Tidak Terverifikasi | 0 |
| 2. | Halaman Khusus Banjarbaru | 1 Halaman | 12 |
| | | ½ Halaman | 8 |
| | | ¼ Halaman | 4 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 3. | Sebaran Oplah | Nasional/Regional | 12 |
| | | Provinsi | 8 |
| | | Kota | 4 |
| 4. | Sebaran Oplah Di Kota Banjarbaru | 1-5 Kecamatan | 12 |
| | | 1-3 Kecamatan | 8 |
| | | 1 Kecamatan | 4 |
| 5. | Jumlah Penerbitan Oplah Harian | > 15.000 | 12 |
| | | 5.000 s/d 15.000 | 8 |
| | | < 5.000 | 4 |
| 6. | Status Wartawan | Ada Khusus Banjarbaru | 6 |
| | | Ada Merangkap Daerah Lain | 4 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 7. | Wartawan yang Bertugas di Banjarbaru Memiliki Kompetensi (UKW) Minimal Tingkat Muda | Sudah | 6 |
| | | Belum | 0 |
| 8. | Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Memiliki Kompetensi (UKW) Wartawan Utama | Ada | 12 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 9. | Cakupan Media | Nasional/Regional | 12 |
| | | Provinsi | 8 |
| | | Kota | 4 |
| 11. | Frekuensi Penerbitan | 1 Kali Sehari | 12 |
| | | 4 Kali Sebulan | 8 |
| | | 2 Kali Sebulan | 4 |

Penilaian :

| No | Poin | Kategori Tier |
|----|----------|---------------|
| 1. | 89 – 108 | Tier I |
| 2. | 69 – 88 | Tier II |
| 3. | 49 – 68 | Tier III |
| 4. | ≤48 | Tier IV |

STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

| NO. | URAIAN KRITERIA | FAKTOR VERIFIKASI | POIN |
|-----|--|------------------------------|------|
| 1. | Terverifikasi Di Dewan Pers | Terverifikasi Faktual | 12 |
| | | Terverifikasi Administrasi | 6 |
| | | Tidak Terverifikasi | 0 |
| 2. | Analisa Digital Web/ Google Analytics | Ada | 8 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 3. | Jumlah Viewer di Analisa Digital Web/ Google Analytics minimal 1 bulan terakhir | > 5.000.000 | 8 |
| | | 1.000.000 s/d 5.000.000 | 6 |
| | | 500.000 s/d 999.000 | 4 |
| | | < 500.000 | 2 |
| 4. | Usia Web | 1-2 Tahun | 0 |
| | | 2,1-4 Tahun | 2 |
| | | 4,1-6 Tahun | 4 |
| | | 6,1-8 Tahun | 6 |
| | | > 8 Tahun | 8 |
| 5. | Halaman Web | Halaman Khusus Banjarbaru | 12 |
| | | Tanpa Halaman Banjarbaru | 6 |
| 6. | Masa Expired/ Kadaluwarsa Web | 1 Tahun | 4 |
| | | 2 Tahun | 6 |
| | | 3 Tahun atau Lebih | 8 |
| 7. | Status Wartawan | Ada Khusus Banjarbaru | 6 |
| | | Ada Merangkap Daerah Lain | 4 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 8. | Wartawan yang Bertugas di Banjarbaru Memiliki Kompetensi (UKW) Minimal Tingkat Muda | Sudah | 12 |
| | | Belum | 0 |
| 9. | Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Memiliki Kompetensi (UKW) Wartawan Utama | Ada | 12 |
| | | Tidak Ada | 0 |

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 10. | Update Berita Umum Saat Pengajuan | Ada | 6 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 11. | Update Berita Banjarbaru Saat Pengajuan | Ada | 6 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 12. | Followers Media Sosial (IG/FB/Youtube/Tiktok) | > 100.000 | 12 |
| | | 50.001 s/d 100.000 | 10 |
| | | 10.001 s/d 50.000 | 8 |
| | | 6.001 s/d 10.000 | 6 |
| | | 3.001 s/d 6.000 | 4 |
| | | 1.001 s/d 3.000 | 2 |
| | | < 1.000 | 0 |
| 13. | Layanan Informasi Tambahan Luar Ruang | Display Informasi di Ruang Publik (Videotron/Digital Display) | 6 |
| | | Program Podcast Rutin | 4 |
| | | Tidak Ada | 0 |

Penilaian :

| No | Poin | Kategori Tier |
|----|----------|---------------|
| 1. | 96 - 116 | Tier I |
| 2. | 76 - 95 | Tier II |
| 3. | 56 - 75 | Tier III |
| 4. | ≤ 55 | Tier IV |

STANDAR POIN KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

| NO. | URAIAN KRITERIA | FAKTOR VERIFIKASI | POIN |
|-----|---|----------------------------|------|
| 1. | Terverifikasi Di Dewan Pers | Terverifikasi Faktual | 12 |
| | | Terverifikasi Administrasi | 6 |
| | | Tidak Terverifikasi | 0 |
| 2. | Cakupan Siaran | 1-5 Kecamatan | 12 |
| | | 1-3 Kecamatan | 8 |
| | | 1 Kecamatan | 4 |
| 3. | Status Wartawan | Ada Khusus Banjarbaru | 6 |
| | | Ada Merangkap Daerah Lain | 4 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 4. | Wartawan yang Bertugas di Banjarbaru Memiliki Kompetensi (UKW) Minimal Tingkat Muda | Sudah | 6 |
| | | Belum | 0 |
| 5. | Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Memiliki Kompetensi (UKW) Wartawan Utama | Ada | 12 |
| | | Tidak Ada | 0 |
| 6. | Siaran Khusus Media Elektronik | Digital | 12 |
| | | Analog | 0 |
| 7. | Jam Tayang Siaran | > 10 Jam | 12 |
| | | < 10 Jam | 6 |
| | | < 5 Jam | 0 |

Penilaian :

| No | Poin | Kategori Tier |
|----|---------|---------------|
| 1. | 53 - 72 | Tier I |
| 2. | 33 - 52 | Tier II |
| 3. | 20 - 32 | Tier III |
| 4. | < 20 | Tier IV |

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTIARIFFIN